

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN
(Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**WULAN BUDININGSIH
NIM. 1522201035**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Budiningsih
NIM : 1522201035
Jenjang : Strata 1 (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa
Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada
Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten
Banyumas)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila ada ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun.

Purwokerto, 08 Oktober 2019

Yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Wulan Budiningsih
NIM. 1522201035



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN
(Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Saodari Wulan Budiningsih NIM. 15222011035 Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji


Dr. Anabik, M.Ag.
NIP. 196512051993021004

Sekretaris Sidang/Penguji


Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.
NIP. 197807163009012006

Pembimbing/Penguji


An Solikhin, M.Ag.
NIP. 197208052001121003

Purwokerto, 18 Oktober 2019
Mengatakan/Mengesahkan

Dekan


Dr. M. Idris Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Wulan Budiningsih, NIM. 1522201035 yang berjudul:

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA
DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**

**(Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 08 Oktober 2019
Pembimbing


Amin Solihin, M.A.

NIP 197208058001181002

MOTTO

“Hiduplah hari ini dan lakukan ! Karena esok adalah kejutan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur *Alhamdulillah* *robbil'alamin*, penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis sayangi, teruntuk cahaya hati:

- ✧ Kedua Orang Tua tercinta, M. Khusen dan Badriyah, sosok ksatria sejati dan juga malaikat pelindung, yang telah banyak meneteskan air mata disetiap sujud dan sepertiga malam-Nya, yang ikhlas memberikan waktu, tenaga, materi dan segalanya hanya untuk kebahagiaan penulis..
- ✧ Saudara seperanakan, kakak dan adik yang selalu memberi warna dalam hidup ini, suka duka dalam keluarga kita lalui bersama dengan penuh kasih sayang.
- ✧ Kepada saudara sambung, Angger Pratama, terimakasih karena sudah menjadi super hero dalam hidup ini salah satunya memberikan dukungan berupa netbook yang diberikan percuma, dan kemudian sekarang hilang kabar entah dimana, penulis doakan semoga selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan kebahagiaan sejati.
- ✧ Terimakasih kepada Khafid Tazali, yang selalu suport di setiap langkahku, terutama bertempur melawan kemalasan mengerjakan skripsi, semoga selalu sabar dan selalu ada di setiap langkahku, karena kau adalah sosok teman, sahabat, partner, musuh, kaka, sampai ojeg. Semoga bisa selalu menemani langkahku sampai akhir waktu.
- ✧ Kepada Mas Zaimul In'am, terimakasih, karena sudah menjadi kakak tempat curhat, berbagai persoalan selama ini. Yang selalu penulis ingat adalah tentang keinginan dan kebutuhan, yang semua itu harus menjadi pertimbangan dan ikhlas untuk menerima, juga terimakasih karena selalu ada setiap penulis membutuhkan sesuatu.
- ✧ Terimakasih kepada psikopat, yang membuat penulis semakin kuat dalam menghadapi apapun.
- ✧ Untuk teman, sahabat, bahkan sudah menjadi saudara. Ada di setiap langkah penulis dan menjadi saksi hidup, Nur Maulidina, Umi Atika, Lutfiana

Rofikoh, Muhimatul Aliyah, Rahmat Nur Hidayat, Kharis Amrulloh, Khafid Tazali, terimakasih sudah menerima penulis apa adanya dengan segenap kekonyolan dan kekurangan yang ada. Semoga persahabatan ini tak berakhir, sampai kita tua nanti.

- ✧ Terimakasih kepada Risma Umami, teman perjuangan yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi, dan juga teman neckad travler, teman *klayaban*, teman shopping, teman ghibah sambil makan ah sudah seperti saudara, semoga selalu terjaga sampai tua.
- ✧ Kepada Tita Ratna S, Tika Kurniawati, Rokhimatul Mufidah, Felicia M, Laeli Nur A, terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat, juga saudara dari pertama masuk kuliah sampai sekarang dan seterusnya. Terimakasih karena sudah menerima dan bersedia menutup apapun yang ada didiri penulis.
- ✧ Teman-Teman Ekonomi Syariah A 2015 yang untuk setiap harinya selalu banyak cerita. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.
- ✧ Kepada ADIKSI, terimakasih karena sudah memberikan penulis beasiswa bidikmisi. Dengan beasiswa bidikmisi, alhamdulillah penulis bisa meneruskan pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. Terimakasih kepada teman ADIKSI, karena sudah memberikan banyak motivasi dan dorongan, kalian luar biasa !

Yang tiada henti memberikan kasih sayang tulus, menguatkan dengan nasihat, dukungan serta selalu mendoakan di setiap proses yang kujalani, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati umat Islam.


Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
4. Iin Solihin, M.Ag. Dosen Pembimbing, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta masukan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi IAIN Purwokerto atas dukungan dan segala bantuan serta fasilitas yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu terimakasih atas motivasi, bimbingannya, doa dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 khususnya kelas Ekonomi Syariah A dan Ekonomi Syariah B yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Keluarga Besar DEMA FEBI Kabinet Inspirasi Periode 2017/2018 atas pembelajaran ilmu dan memberikan warna dalam dunia perkuliahan.

9. Keluarga Besar ADIKSI, yang selalu memotivasi dan mendorong agar skripsi ini segera terselesaikan.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Jazzakallahu khairan katsiran, atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan. Sehingga sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa robbal'alamiin*.

Purwokerto, 08 Oktober 2019


Wulan Budiningsih
NIM. 1522201035

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَىٰ - *haua*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	Ditulis <i>nazzala</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung

Contoh:

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalamu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	Ditulis <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	Ditulis <i>fa aufū al-kaila waal-mīzan</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	Ditulis <i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	Ditulis <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN
(Studi Kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten
Banyumas)**

Wulan Budiningsih
NIM. 1522201035

E-mail: budiningsihwulan@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi garapan pemerintah di Indonesia. Sudah berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, seperti BLT, *charity* dan lain sebagainya. Tetapi permasalahan tentang kemiskinan belum terselesaikan. Keluarlah Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014, tentang Dana Desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Tak dipungkiri, untuk membangun memang harus dari lapisan paling bawah, yaitu desa. Dengan adanya dana desa kemudian desa bisa lebih melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan asli desa. Strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Melung adalah menjalankan proses dengan sistematis, dan lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Dimana keinginan disini adalah keinginan mewujudkan visi dan misi dari Kepala Desa Melung itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Melung melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Melung, karena menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa. Dibuktikan dengan perubahan status Desa Melung dari sebelum adanya dana desa adalah desa tertinggal, kemudian setelah adanya dana desa menjadi desa berkembang dan optimis untuk menjadi desa mandiri.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Kemiskinan*

**COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGY
THROUGH VILLAGE FUNDS AS A POVERTY ALLEVIATION
EFFORTS
(Case Study in Melung Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency)**

Wulan Budiningsih
NIM. 1522201035

E-mail: budiningsihwulan@gmail.com

*Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)*

ABSTRACT

Poverty is a problem that is still a claim of the government in Indonesia. There have been various policies and programs carried out by the government in the context of poverty alleviation, such as BLT, charity and so forth. But the problem of poverty has not been resolved. Act Number 60 of 2014 came out, regarding Village Funds as an effort to overcome poverty. No doubt, to build it must be from the lowest layer, namely the village. With the existence of village funds, the village can further develop and empower the community in order to create jobs and village income. The strategy taken by the Melung Village Government is to carry out the process systematically, and prioritize needs rather than needs. Where the desire here is the desire to realize the vision and mission of the Melung Village Head himself.

The purpose of this research is to find out how the community empowerment strategy through village funds as an effort to overcome poverty in Melung Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. This study uses field research with qualitative research types and descriptive analytical methods.

The results of the study can be concluded that the strategy undertaken by the Melung Village Government through community empowerment in the presence of village funds is able to overcome the poverty in Melung Village, because absorbing the workforce, conducting training that impacts on productive communities, and creating a tourism unit, which can support income native to the village. Evidenced by the change in the status of the Melung Village from before the village fund was a backward village, then after the village funds became a developing and optimistic village to become an independent village.

Key Words: Community Empowerment, Village Funds, Poverty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Definisi Operasional	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Pembahasan	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lembaga Keuangan Mikro	
1. Lembaga Keuangan Mikro: Konvensional dan Syariah	
2. Dasar-Dasar Lembaga Keuangan Mikro	
B. Rasio Keuangan	
C. Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro	
1. Permodalan	
2. Efisiensi	
3. Likuiditas	

4. Kemandirian dan Pertumbuhan	
5. Penetapan Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro	
D. Kajian Pustaka	
E. Kerangka Berpikir	
F. Landasan Teoritis	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	
B. Tempat dan Waktu Penelitian	
C. Populasi dan Sampel	
D. Sumber Data	
E. Teknik Analisis Data	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
B. Hasil Penelitian	
1. Permodalan	
2. Efisiensi	
3. Likuiditas	
4. Kemandirian dan Pertumbuhan	
5. Penetapan Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro	
C. Pembahasan	
1. Permodalan	
2. Efisiensi	
3. Likuiditas	
4. Kemandirian dan Pertumbuhan	
5. Penetapan Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Kinerja Keuangan LKM-LKMS di Indonesia	11
Tabel 2.1	Perhitungan Kriteria Rasio Permodalan	29
Tabel 2.2	Modal inti dan modal pelengkap LKM	30
Tabel 2.3	Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	31
Tabel 2.4	Perhitungan kriteria rasio CAR	32
Tabel 2.5	Perhitungan kriteria rasio biaya operasional terhadap pelayanan	33
Tabel 2.6	Perhitungan kriteria rasio aktiva tetap terhadap total aset	34
Tabel 2.7	Perhitungan kriteria rasio kas	35
Tabel 2.8	Perhitungan kriteria rasio pembiayaan	35
Tabel 2.9	Perhitungan kriteria rasio rentabilitas asset	36
Tabel 2.10	Perhitungan kriteria rasio rentabilitas ekuitas	37
Tabel 2.11	Perhitungan kriteria rasio kemandirian operasional	38
Tabel 2.12	Penetapan predikat tingkat kesehatan keuangan lembaga keuangan mikro	39
Tabel 2.13	Penelitian terdahulu	43
Tabel 3.1	Penilaian tingkat kesehatan keuangan lembaga keuangan mikro	54
Tabel 3.2	Penetapan predikat tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro	55
Tabel 4.1	Jumlah LKM terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2019	56
Tabel 4.2	Analisis rasio modal sendiri terhadap total aset	58
Tabel 4.3	Perhitungan skor pada rasio modal sendiri terhadap total aset ...	58
Tabel 4.4	Analisis rasio kecukupan modal (CAR)	59
Tabel 4.5	Perhitungan skor pada rasio kecukupan modal (CAR)	60
Tabel 4.6	Analisis rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto tahun 2017-2019	61
Tabel 4.7	Perhitungan skor pada rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	61
Tabel 4.8	Analisis rasio aktiva tetap terhadap total aset	62
Tabel 4.9	Perhitungan skor pada rasio aktiva tetap terhadap total aset	63

Tabel 4.10	Analisis rasio kas (<i>cash</i> rasio)	63
Tabel 4.11	Perhitungan skor pada rasio rasiokas (<i>cash</i> rasio)	64
Tabel 4.12	Analisis rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	65
Tabel 4.13	Perhitungan skor pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	65
Tabel 4.14	Analisis rasio rentabilitas aset	66
Tabel 4.15	Perhitungan skor pada rasio rentabilitas aset	67
Tabel 4.16	Analisis rasio rentabilitas ekuitas	67
Tabel 4.17	Perhitungan skor pada rasio rentabilitas ekuitas	68
Tabel 4.18	Analisis rasio kemandirian operasional pelayanan	68
Tabel 4.19	Perhitungan skor pada rasio kemandirian operasional pelayanan	69
Tabel 4.20	Hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan LKM: konvensional dan syariah tahun 2017-2019	70



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pelaku LKM di Indonesia Tahun 2017-2019	9
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan aset LKM-LKMS di Indonesia tahun 2017-2019	10
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1 grafik perbandingan rasio modal sendiri terhadap aset LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	72
Gambar 4.2 grafik perbandingan rasio kecukupan modal (CAR) LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	73
Gambar 4.3 grafik perbandingan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	75
Gambar 4.4 grafik perbandingan rasio aktiva tetap terhadap total asset LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	76
Gambar 4.5 grafik perbandingan rasio kas LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	78
Gambar 4.6 grafik perbandingan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	80
Gambar 4.7 grafik perbandingan rasio rentabilitas asset LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	82
Gambar 4.8 grafik perbandingan rasio rentabilitas ekuitas LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	83
Gambar 4.9 grafik perbandingan rasio kemandirian operasional pelayanan LKM konvensional dan syariah tahun 2017-2019	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4. Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekuasaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin.¹

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekeliruan dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tidak diimbangi dengan pemerataan.²

Di Indonesia, penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dikalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat kemiskinan di Indonesia relatif mudah, apabila indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Upaya pengentasan kemiskinan sudah pasti telah dilakukan pemerintah, melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan *charity*, membagikan uang kepada kaum dhuafa atau manusia yang hidup dalam zona kemiskinan, ketertindasan, kelemahan dan ketidakberdayaan dalam bentuk

¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 83.

² Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 73

program bantuan tunai langsung (BLT). Rupanya solusi yang jitu dalam menanggulangi kemiskinan belum di temukan.³

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa.⁴

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.⁵ Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang

³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, hlm.83

⁴ M. Indra Maulana, "*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁵ Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, E-Book:Kementrian Keuangan, 2017

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat;
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain sebagainya.⁷

Undang – Undang Desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸ Setidaknya ada dua alasan mengapa masalah pembangunan masih relevan di bahas. *Pertama*, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan mulai susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota. *Kedua*, kendati sejak awal

⁶ Risma Hafid, “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pengkep”, Skripsi. Makasar: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

⁷ M. Indra Maulana, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁸ Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa, E-Book* : Kementrian Keuangan, 2017

tahun 1970-an pemerintah Orde Baru telah mencanangkan berbagai macam kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan.⁹ Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi gradasi terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik. Ini mengandung maksud bahwa program satu dengan yang lain saling mendukung sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan *people driven* dimana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis. Untuk mensukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang meredefinisi peran pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.¹⁰

Strategi sangat diperlukan dalam perihal pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat sangat miskin (*hard rock*), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program

⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 29

¹⁰ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, hlm. 76

pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu hidup mandiri. Menurut Parsons, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Adapun menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Secara lebih rinci oleh Slamet, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inofatif.¹¹

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian pemerintah desa harus mengabambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa. Berkenaan dengan desentralisasi atau otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai

¹¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, hlm. 51 dan 86

bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Desa Melung merupakan desa yang letaknya paling utara di Kecamatan Kedungbanteng, tepatnya di bawah lereng Gunung Selamat. Desa Melung merupakan desa yang terglong tertinggal di Kecamatan Kedungbanteng, karena lokasinya yang jauh dari pusat kota atau pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, setidaknya sedikit kesempatan kerja di luar pertanian, dan jauh dari pasar.¹² Tercatat sebelum adanya dana desa, Desa Melung masuk kategori desa tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Dengan pernyataan tersebut, maka dalam melakukan pembangunan diperlukan bantuan dana yang akan mengembangkan dan kemudian mensejahterakan masyarakat desanya, lalu kemudian dengan adanya dana desa mampu membuat Desa Melung menjadi desa yang berkembang atau yang disebut Desa Pra-Sembada, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya bantuan dari dana desa, kemudian bertahap dengan program dan strategi dalam memberdayakan masyarakatnya, maka Pemerintah Desa Melung merasa optimis untuk menjadikan Desa Melung menjadi desa yang mandiri. Berdasarkan wawancara dengan aparat Desa Melung, yaitu Sekertaris

¹² Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan kedaulatan Pangan*”, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 1

Desa Melung mengaku optimis untuk bisa menjadikan Desa Melung menjadi desa mandiri. Dengan meningkatkan program pemberdayaan yang akan menciptakan lowongan pekerjaan dan pelatihan-pelatihan yang kemudian nantinya akan bersama-sama membangun desa, juga memperbaiki sarana transportasi seperti memperbaiki akses jalan agar supaya mempermudah untuk masyarakat Desa Melung melakukan kegiatan, ataupun untuk mempermudah wisatawan agar dengan mudah bisa mengunjungi wisata yang ada di Desa Melung, dan pembangunan lainnya.

Besaran dana desa yang diterima oleh desa adalah jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitatan geografis. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.¹³ Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Melung :

Tabel 1.1
Dana Desa yang diterima Desa Melung Periode 2015-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp. 289.872.500,00
2	2016	Rp. 643.031.664,00
3	2017	Rp. 820.104.546,00
4	2018	Rp. 907.115.000,00
5	2019	Rp. 1.000.095.388,00

Sumber : APBD Desa Melung tahun 2015-2019

Dari data tersebut, alokasi dana desa telah dilakukan sejak tahun 2015 dan 2016 dana desa masih difokuskan untuk pembangunan desa, yaitu dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa, seperti infrastruktur jalan, pengaspalan jalan dan pembuatan jalan pertanian, dan irigasi. Sedangkan pada tahun 2017 sampai sekarang alokasi dana desa selain untuk infrastruktur atau pembangunan desa, seperti pembangunan jalan, irigasi, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan, dan wisata.

¹³ www.kemenkeu.go.id, diakses pada hari 25 Juli 2019, pukul 10.10

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya program pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Melung adalah melakukan proses yang dijalankan dengan sistematis, kemudian lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Dimana keinginan yang dimaksud adalah keinginan tercapainya visi kepala desa yaitu membentuk Desa Melung yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Ini berarti, pemerintah desa menginginkan agar masyarakat bukan hanya menerima kebutuhan, tetapi harapannya adalah membentuk lapangan pekerjaan, pelatihan yang akan menambah ketrampilan dan wawasan, juga menjadikan Desa Melung mejadi desa yang mandiri, sejahtera. Dengan mengadakan pelatihan seperti pembuatan piring lidi, pelatihan tata boga yaitu hantaran pengantin, pelatihan pengelolaan limbah. Selain pelatihan, ada juga pemberdayaan di sektor wisata, yaitu wisata pagubugan dengan memanfaatkan bengkok sawah. Awalmulanya adalah dengan melihat potensi, karena di Desa Melung merupakan tempat bagi pelepasan dan pengamatan elang jawa, kemudian masyarakat berinisiatif, untuk mengolah bengkok sawah menjadi tempat yang apik, bisa sebagai sarana wisata. Ternyata, dengan adanya wisata pagubugan tersebut, Desa Melung mampu menjadi desa yang diminati dikalangan wisatawan. Dengan adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segi pelatihan, pembangunan sarana prasarana, serta dapat mengembangkan potensi lokal yang di dasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Arah pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) atau melibatkan masyarakat secara langsung memiliki hasil yang lebih efektif daripada menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari masyarakat luar desa atau desa lain. Ini juga merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan rasa gotong royong antar warga desa.

Islam memandang suatu keberadaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma

yang holistik dan strategis.¹⁴ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik lagi. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci al-Quran yaitu QS. Ar-Ra'd ayat 11,

ان الله لا يغير ما بقو حتى يغيروا ما بأ نفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

Artinya : *“sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.”*

Arti ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka.

Dan juga dalam surat Al- Mulk ayat 15.

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuruNya dan makanlah sebagian dari rezeki Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dalam (kembali setelah) dibangkitkan”.*

Dari surat tersebut, maka penelitian ini menitik beratkan pada persepsi kemaslahatan, strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini menitik beratkan pada STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG.

¹⁴ Muthoriq dkk, *“Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, hal.426

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat oleh pembaca terhadap judul penelitian ini, maka penulis pertegas istilah-istilah pada judul tersebut :

1. Strategi

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategeia* (*stratos*= militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewits dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut strategi dapat di definisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.¹⁵

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.¹⁶ Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.¹⁷

¹⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.3

¹⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 43

¹⁷ *Ibid.*...hlm. 24-25

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk : pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1 ayat 8, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

4. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD \$ 1 per hari. Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatanya berada di posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah

¹⁸ www.kemenkeu.go.id , diakses pada hari kamis, 25 Juli 2019, pukul 11.12

¹⁹ Muhamad Nafiudin, "*Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*", Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin di sebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum dijangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang di sebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?*

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam memberikan sumbangan ilmu yang diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

²⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global....*, hlm. 84

- c. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulis lainya yang melakukan penelitian ataupun pembahasan lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Mengkaji hasil penelitian terdahulu adalah mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang telah ada dan belum ada.²¹ Dalam membahas tentang pemberdayaan masyarakat, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Buku Oos M. Anwas yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*” dalam buku ini salah satu babnya membahas konsep pemberdayaan, salah satu teorinya dari Slamet, menekankan bahwa pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.²²

Sunyoto Usman dalam bukunya yang berjudul “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*” __menjelaskan bahwa masalah pembangunan masyarakat desa masih relevan dibahas, karena bisa menjadi pemicu berbagai konflik politik atau gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan. Karena itu, persoalan ini harus terus dicarikan alternatif pemecahanya supaya tidak mengganggu stabilitas. Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah

²¹ Suharsimi Arisusanto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: RinekaCipta, 2000), hlm.75

²² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*,.... hlm. 49

kehidupan mereka menjadi lebih baik, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat desa.²³

Abdul Bashith, dalam bukunya yang berjudul “*Ekonomi Kemasyarakatan*” mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui tiga pilar, yaitu: mengembangkan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin, memberdayakan kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat miskin, dan meningkatkan kualitas jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang tergolong sangat miskin.²⁴

Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks, dalam bukunya yang berjudul “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Pedesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*” membahas tentang pembangunan pedesaan, karakteristik desa, fase pembangunan pedesaan, dan skema strategi pembangunan. Dalam bukunya juga mengatakan bahwa pembangunan di negara berkembang harus melihat wilayah pedesaan sebagai fokus dan target pembangunan.²⁵

HAW. Widjaya, dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*”, dalam bukunya membahas tentang dasar dan landasan hukum tentang Desa dan Pemerintahan Desa. Otonomi Desa merupakan otonomi daulat, asli dan utuh. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.²⁶

Junaidin Zakaria, dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, dalam salah satu babnya menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana manusia atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok.

²³ Sunyoto Usman, “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”,.... hlm.29

²⁴ Abdul Bashith, “*Ekonomi Kemasyarakatan*”,.... hlm.17

²⁵ Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*”,hlm. v

²⁶ HAW. Widjaja, “*Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Kebutuhan yang paling pokok, seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain sebagainya, (Emil Salim).²⁷

Selain buku-buku tersebut diatas penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian telah dilakukan oleh Rudiana Mulia dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Ijuk Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka, Jawa Barat)*” menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat desa Cimuncang dilakukan melalui tiga tahap, pertama, upaya yang terarah dengan menciptakan keadaan masyarakat yang berkembang dengan segala potensi yang dimiliki. Kedua, melibatkan seluruh aspek khususnya lapisan bawah yang menjadi sasaran. Ketiga, menegakkan nilai keadilan dan kelayakan dalam arti melindungi.²⁸

Feni Yudanti Prasetyaningtyas, dalam Skripsinya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*”, menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Karangluhur termasuk di dalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Karangluhur termuat dalam peraturan menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dapat terdiri dari perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan dan pencarian, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.²⁹

Risma Hafid, dalam skripsinya yang berjudul “*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*” menarik kesimpulan bahwa dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan

²⁷ Junaidin Zakaria, “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 94

²⁸ Rudiana Mulia, “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka, Jawa Barat)*”, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015

²⁹ Feny Yudanti Prasetyaningtyas, “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*” Skripsi Semarang: Universtas Diponegoro.

pembangunan desa sudah cukup efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga terlihat cukup baik, dimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan.³⁰

Indra Maulana, dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*” yang berisi bahwa setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sinar Palembang.³¹

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, dalam jurnalnya yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*” menarik kesimpulan bahwa secara umum penggunaan dana desa berdasarkan sasaran pemberdayaan adalah sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.³²

Mohamad Eko Atmojo, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*” yang berisi bahwa pemberdayaan memang tak lepas dari dibutuhkananya partisipasi dari masyarakat yang ikut serta aktif dalam

³⁰ Risma Hafid, “*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mengilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*”, Skripsi Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2017

³¹ M. Indra Maulana, “*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung)*” Skripsi Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

³² Suwondo dkk, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal 1203-1212.

pembangunan desa yang mulaidari perencanaan yaitu musrenbang, pelaksanaan yaitu masyarakat aktif dalam memberikan usulan pengadaan dan produktifitas desa, dan juga evaluasi masyarakat aktif adalah hal program pengawasan pemerintahan desa, dan juga memberikan masukan serta kritikan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.³³

Depi Rahayu, dalam jurnalnya yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen, Kabupaten Semarang*” yang menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut : mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.³⁴

Erniyati, dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara*” yang berisi bahwa strategi pemberdayaan masyarakat di kelurahan desa Semper Barat Jakarta Utara yang dilakukan oleh PPMK menggunakan strategi Aras Mezzo. Strategi tersebut dilakukan melalui pelatihan komputer dan dana bergulir. Strategi pemberdayaan masyarakat untuk pelatihan komputer diberikan bimbingan berupa dana bergulir yaitu memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau melalui usaha baru. Demikian memperoleh manfaat untuk mereka agar bisa punya keahlian di bidang komputer dan dapat mengembangkan keahlian tersebut dengan membuka usahanya sendiri.³⁵

³³ Mohamad Eko Atmojo, dkk. “*Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*” Jurnal: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017

³⁴ Depi Rahayu, “*Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*” Jurnal: Universitas Negeri Semarang, Economics Development Analysis Journal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017

³⁵Erniati, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara*”, Skripsi: Univrsitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2010.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Rudiana Mulia (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Ijuk Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka Jawa Barat)	Proses Pemberdayaan Masyarakat desa Cimuncang dilakukan melalui tiga tahap, <i>pertama</i> , upaya yang terarah dengan menciptakan keadaan masyarakat yang berkembang dengan segala potensi yang dimiliki. <i>Kedua</i> , melibatkan seluruh aspek khususnya lapisan bawah yang menjadi sasaran. <i>Ketiga</i> , menegakkan nilai keadilan dan kelayakan dalam arti melindungi.	Perbedaan dengan peneliti adalah pada sarana yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat. Peneliti menggunakan Dana Desa.
Risma Hafid (2017)	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016	Kemanfaatan untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa sudah cukup efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga terlihat cukup baik, dimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan.	Perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada strategi pemberdayaan masyarakat, kemudian upaya mengatasi kemiskinan di desa.
Indra Maulana (2018)	Peran Dana Desa Dalam	Adanya dana desa masyarakat mulai	Perbedaannya adalah penulis

	Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gotong-royong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sinar Palembang	lebih memfokuskan pada strategi yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan yang kemudian berdampak pada pengentasan kemiskinan masyarakatnya
Feni Yudanti Prasetyaningtyas (2015)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo	Pengelolaan keuangan Desa Karangluhur termasuk di dalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dapat terdiri dari perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan dan pencarian, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban	Perbedaannya adalah Peneliti lebih memfokuskan pada strategi yang dilakukan Pemerintah Desa, dalam memberdayakan masyarakat yang nantinya akan mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Erniyati (2010)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara	Strategi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Desa Semper Barat Jakarta Utara yang dilakukan oleh PPMK menggunakan strategi Aras Mezo. Strategi tersebut dilakukan melalui pelatihan komputer dan dana bergulir.	Perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian pada desa, dan sarana yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui program dana desa.
Depi Rahayu (2017)	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang	Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.	Perbedaannya adalah pada strategi yang digunakan oleh pemerintah desa tentunya berbeda, dan fokus peneliti adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat tersebut mampu mengangkat kemiskinan pada desa tersebut.

Dari beberapa karya dan kajian, setelah penulis mengamati dan menelusirinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan masih belum ada. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa, Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas”.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab : latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi mengenai kerangka teoritis yang dibagi menjadi beberapa sub menurut judul yang akan dibahas.

BAB III berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran desa atau profil desa, kemudian bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Desa Melung.

BAB V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos*=militer; dan *ag* = *memimpin*), yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewits dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplemantasikan misinya.³⁶

Menurut KBBI strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang atau damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menyebarkan lokasi sumber daya dan aktifitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi maupun sasaran. Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktifitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktifitas dengan cara yang berbeda dari pesaing. Strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas lain untuk menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowerd*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitupula menurut Rappaport ,

³⁶ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.3

pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Selanjutnya menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.³⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.³⁸

Menurut Charles Elliot, pemahaman terhadap keberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan :

a. *The Welfare Approach* (pendekatan kesejahteraan)

Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power* (pusat kekuatan) yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat.

b. *The Development Approach* (pendekatan perkembangan)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembnagkan proyek pembangunan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

c. *The Powerment Approach* (pendekatan keberdayaan)

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.³⁹

³⁷ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global...* hlm.49

³⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh...* hlm.16

³⁹ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan...* hlm. 34

2. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agem pemberdaya perlu memegang prinsip-prinsip pemnerdayaan. Prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilaksanakan secara benar. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi. Hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak. Pemberdayaan perlu mengenali secara tepat dan akurat. Dalam hal ini pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami kebutuhan masyarakatnya.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar. Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia.
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- l. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- m. Petugas pemberdayaan perlu memiliki kemampuan yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Petugas pemberdayaan ini bertugas sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader,

ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya.⁴⁰

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.⁴¹

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.⁴²

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam adalah karena adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam islam, konsep pemberdayaan masyarakat di jelaskan dalam Al-Quran QS. Ar-Ra'd ayat 11 :

ن الله لا يغير ما بقو حتى يغيروا ما بأ نفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء أفلا مرددله

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap*

⁴⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global...* hlm. 58-60

⁴¹ M. Indra Maulana, “*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁴² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global...* hlm. 51

suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan , selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Hal ini tentu sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dimana melalui pemberdayaan masyarakat maka masyarakat dapat di beri peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaanya. Dengan diberi pelatihan ataupun dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan mereka dapat mengelola dan mengolah sumber daya tersebut, dapat mengubah keadaannya ataupun menaikkan derajatnya dari miskin menjadi mempunyai kemampuan dan nilai.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan hakikatnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (labolaturium). Suatu model cenderung harus membuat terlebih dahulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan berpartisipasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara atau pendekatan mereka. Dengan demikian, model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.⁴³

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

⁴³ *Ibid...* hlm. 51

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjelaskan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁴⁴

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitupula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih dan memilah cara atau

⁴⁴ *Ibid.*...hlm.87 dan 88

teknik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara atau teknik ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini Dubois dan Miley menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat :

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien atau sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan menghargai diri klien atau sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien atau sasaran.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien atau sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.⁴⁵

C. Dana Desa

1. Pengertian Desa

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

⁴⁵ *Ibid.*...hlm.88-89

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 Huruf o mengatakan bahwa desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan desa istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahannasional dan di bawah kabupaten.⁴⁷

Desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2. Klasifikasi Status Desa

Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPSTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indekas Desa Membangun :

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi , sertankemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensi menjad Desa Maju, yang memilili potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

⁴⁶ Soepardjo, *Tugas, Fungsi dan Peranannya Dalam Pemerintah di Daerah*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1985), hlm.180

⁴⁷ HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*,

- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.⁴⁸

3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warsito, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Herlina Rahman, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil

⁴⁸ www.permendesaPDTTTransNo2Tahun2016, diakses pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019, pukul 14.23

ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan penggalian dan peningkatan PAD yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.⁴⁹

4. Pemerintahan Desa

Pemerintah, kecamatan dan pemerintah desa adalah pengertian-pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Pemerintah Desa tercermin dari tugas unsur-unsurnya yang terdiri dari :

- a. Kepala Desa bertugas :

⁴⁹ Windu Putra. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok: Rajawali Pres, 2018). hlm.150

- 1) Menyelenggarakan rumah tangga Desa
 - 2) Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.
 - 3) Menumbuhkan serta mengembnagkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.
- b. Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka masyarakat yang bersangkutan, yang berjumlah sedikitnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang tidak termasuk Ketua dan Sekertaris. Kepala Desa dan Sekertaris Desa karena jabatannya adalah Ketua dan Sekertaris Lembaga.⁵⁰
5. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁵¹

Terdapat beberapa pendapatan atau pendanaan bagi desa, diantaranya Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Provinsi, bantuan dari Kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi, dan bantuan dari pihak ketiga. Dana Desa yang penulis maksudkan adalah dana desa sesuai dengan

⁵⁰ Departemen Dalam Negeri, Tugas, Fungsi dan Peranannya dalam Pemerintah Daerah, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 1985).

⁵¹ Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, E-Book:Kementrian Keuangan, 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

6. Sasaran dan Tujuan Dana Desa

a. Sasaran Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Serta, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan Dana Desa

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2) Mengentaskan kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁵²

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemahaman mengenai kemiskinan mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila ada kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, maka hal itulah yang disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan

⁵² www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses hari Minggu, 25 Agustus 2019, pukul 20.30

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.⁵³

Kemiskinan menurut Emil Salim adalah suatu keadaan dimana manusia atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Sedangkan menurut John Kenneth Galbraith, mengemukakan bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari menyetir atau mengatur perekonomian secara lebih tepat. kemiskinan sebagai akibat dari persaingan bebas yang tidak terkendali.⁵⁴

Menurut Sajogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.⁵⁵

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup bekerja. Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga

⁵³ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 175.

⁵⁴ Junaidin Zakaria, *"Pengantar Teori Ekonomi Makro"*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 95-96

⁵⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan....* hlm.72

menyebabkan kesejangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, bodoh, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.⁵⁶

Emil Salim memberikan ciri-ciri penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sesuai dengan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut, *pertama* pada umumnya mereka tidak memiliki factor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal, dan ketrampilan, sehingga mereka tidak mampu menciptakan pendapatan. *Kedua*, mereka tidak memiliki ketrampilan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha. Sedangkan syarat untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan harus mempunyai jaminan kredit. *Ketiga*, tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar. Pendidikan rendah membawa akibat produktifitas rendah dan pendapatan rendah, sehingga mereka tidak dapat menikmati pendidikan tinggi. *Keempat*, mereka banyak tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah atau dengan tanah yang hanya terbatas. Mereka banyak menjadi musiman sehingga pekerjaan mereka tidak bersambung dan menjamin pekerjaan mereka. *Kelima*, banyak mereka tinggal di kota dengan tidak memiliki ketrampilan sedangkan pekerjaan di kota dengan sektor industri yang banyak menggunakan teknik tinggi. Dengan demikian mereka tidak punya peluang untuk masuk pada sektor tersebut. Sehingga kehadiran mereka di kota akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang dapat menimbulkan masalah baru di kota.⁵⁷

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dia membagi kemiskinan menjadi dua bagian, yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material, dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Dalam islam, kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

⁵⁶ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*....hlm. 84

⁵⁷ Junaidin Zakaria, *"Pengantar Teori Ekonomi Makro"*....hlm. 95

Islampun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.⁵⁸

Banyak sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan, bahwasannya Rasulullah SAW sendiri pernah memohon perlindungan Allah SWT dari kemiskinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits berikut

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung dari fitnah kemiskinan.” (HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majjah).

Tampak dari Hadits tersebut sesungguhnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari semua hal yang melemahkan baik secara materi maupun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang, atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu. Dalam Hadits lain, Rasulullah menjelaskan bagaimana bahayanya kefakiran, bahkan beliau menggambarkan bahwasannya kefakiran mendekati kekufuran, sebagaimana Hadits berikut :

“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda kefakiran mendekati kekufuran.” (HR. A bu Daud)⁵⁹

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural. Allah sejatinya telah menjamin rezeki dari setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS. Hud 11:6) Pada saat yang sama, Islam pun telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS. Al-Mulk 67:15). Ditambah lagi setiap makhluk mempunyai rezekinya masing-masing (QS. Al-Ankabut 29:60) dan tidak akan kelaparan (QS. Taha 20:118-119). Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa kemiskinan dalam perspektif islam

⁵⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm.23

⁵⁹ *Ibid.*...hlm.24

akarnya adalah kesalahan manusia itu sendiri dalam perilaku ekonominya, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun distribusi.⁶⁰

Dalam Islam, terdapat dua mazhab dalam menjelaskan tentang siapa yang sebenarnya disebut miskin. Pertama, mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak mempunyai suatu apapun juga. Kedua, mazhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.⁶¹

2. Penyebab Kemiskinan

Dalam Islam, terdapat beberapa pemikiran mengenai penyebab atau masalah kemiskinan. Pertama, pemikiran yang menyucikan kemiskinan. Bagi golongan ini, kemiskinan bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi dibiarkan saja. Dengan demikian, manusia bisa berkonsentrasi untuk berhubungan dengan Tuhannya dan tidak diganggu dengan urusan duniawi. Kedua, pemikiran para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan merupakan takdir Allah dan manusia harus bersabar terhadap ujian tersebut. Ketiga, pemikiran yang hampir sama dengan fatalis, tetapi selangkah lebih maju. Keempat, kaum kapitalis yang memandang kemiskinan akan menimbulkan masalah yang harus diselesaikan dengan orang miskin sendiri. Disisi lain, orang kaya bebas dalam menggunakan hartanya. Kelima, kaum Matrix yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi jika kaum borjuis dan kekayaan tidak dimusnahkan, tetapi ditata menjadi kelas-kelas baru.⁶²

Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan adalah :

- a. Secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.

⁶⁰ Amir Machmud, *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 222

⁶¹ *Ibid.*...hlm.226

⁶² *Ibid.*...hlm.223

- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
 - c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.⁶³
3. Aspek dan Karakteristik Kemiskinan
- Menurut Andre Bayo Ala, ada beberapa aspek kemiskinan yaitu,
- a. Kemiskinan itu multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijaksanaan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin atas aset-aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan pendidikan yang juga kurang baik.
 - b. Aspek-aspek kemiskinan yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
 - c. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya.

⁶³ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*,...hlm.177

Sedangkan menurut Emil Salim, mengemukakan 5 karakteristik kemiskinan, yaitu:

- a. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha. Disamping itu mereka pun tidak memenuhi syarat mendapatkan kredit perbankan, sebagai jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke rentenir yang biasanya mempunyai bunga yang sanget tinggi.
- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, tak sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orangtuanya mencari tambahan pendapatan.
- d. Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah, walaupun ada namun relatif sempit. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Oleh karena pekerjaan pertanian bersifat musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mendukung mereka selalu hidup di bawah kemiskinan.
- e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai kerampilan atau pendidikan, sehingga kota tidak siap menampung gerak urbanisasi dari desa. Dengan kata lain,

kemiskinan pedesaan membuahkn fenomena urbanisasi dari desa ke kota.⁶⁴

4. Indeks Kemiskinan

Argumen umum yang digunakan oleh UNDIP (*United Nations Development Program*) adalah bahwa tolak ukur kemiskinan seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri rendah. Menurut UNDIP, ada tiga pokok yang menentukan tingkat kemiskinan, yaitu:

- a. Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30% penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- b. Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
- c. Tingkat keamanan ekonomi, diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.⁶⁵

5. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang mempunyai tugas utama mengembangkan diskursus serta untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga legislatif dan eksekutif serta masyarakat lainnya untuk menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.⁶⁶

Adapun kebijakan pengentasan kemiskinan, antara lain :

⁶⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*.... hlm.69-71

⁶⁵ *Ibid*....hlm.305

⁶⁶ Abdul Bashith, "*Ekonomi Kemasyarakatan*"..... hlm.74-76

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Di Indonesia atau mungkin dimana saja, pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktifitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

b. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi.

c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Keterlibatan aktif dari LSM di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM juga dapat meningkatkan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.⁶⁷

Menurut Al Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Berusaha dan bekerja; (2) Larangan menumpuk harta; (3) Zakat; (4) Hukum Waris; (5) Gianimah; dan (6) Hemat.⁶⁸

⁶⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*....hlm.307-309

⁶⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm.25

6. Kebijakan Anti Kemiskinan

Irma Adelman, mengemukakan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi penduduk miskin adalah pendekatan yang berorientasi pada produktifitas yang bertujuan meningkatkan pendapatan kaum miskin. Dengan meningkatkan produktifitas mereka dan sekaligus meningkatkan kemampuan memperbesar produktifitas mereka. Upaya meningkatkan produktifitas dapat dilakukan melalui :

- a. Mengatur mutu tenaga kerja melalui investasi dalam modal kemanusiaan
- b. Meningkatkan jumlah milik-milik pelengkap dipunyai kaum miskin (tanah atau modal)
- c. Memperkenalkan perubahan teknis yang meningkatkan produktifitas.

Irma tidak merekomendasikan untuk melakukan pengalihan langsung barang dan jasa yang diperlukan oleh kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alasan ; *pertama*, pendekatan pengalihan langsung kurang efektif karena cenderung habis. *Kedua*, hal itu di luar kemampuan pemerintah negara berkembang. *Ketiga*, hal itu perlu dipertahankan terus selama-lamanya. *Keempat*, hal itu tidak memungkinkan kaum miskin untuk memutuskan pola konsumsinya sesuai dengan prioritas mereka sendiri, budaya mereka, keadaan mereka.⁶⁹

IAIN PURWOKERTO

⁶⁹ Junaidin Zakaria, "Pengantar Teori Ekonomi Makro",.... hlm.96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian atau lapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.⁷⁰ Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang yang dapat diamati.⁷¹ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, objek yang menjadi sasaran penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Peneliti secara bertahap akan melakukan pengamatan langsung segala aktifitas yang dilakukan di Desa Melung, terkait strategi yang di terapkan melalui dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga kemaslahatan masyarakatnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena Desa Melung merupakan desa yang terletak didesa paling ujung utara Kecamatan Kedungbanteng, lokasinya yang jauh dari pusat kota atau pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja di luar pertanian, dan jauh dari pasar. Tercatat sebelum adanya dana desa, Desa Melung termasuk desa IDT, dan desa dengan akses jalan yang masih sangat sulit di jangkau. Lalu kemudian setelah adanya program dana desa, mampu mengangkat status Desa Melung menjadi desa

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi refisi*,.... hlm. 26

⁷¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

berkembang. Dengan pertimbangan tersebut, jadi sekiranya penulis memilih Desa Melung untuk di jadikan sasaran penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan demikian penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan.

C. Sumber Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat di bedakan dengan data lain, dapat dianalisis, dan relevan dengan problem tertentu.⁷² Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi data.⁷³ Sumber data primer yang penulis peroleh berupa hasil observasi langsung di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, berupa wawancara dengan subjek penelitian yaitu Pendamping Desa, Sekertaris Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng beserta perangkat lain, dan juga masyarakat terkait strategi yang di gukanakan dalam memberdayakan masyarakat dengan adanya dana desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subjek penelitian. data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini adalah data – data yang berasal dari catatan, buku, jurnal ataupun skripsi terdahulu yang membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

⁷² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian...* hlm. 53

⁷³ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian,....*hlm. 91

D. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, dimana pada subjek inilah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah

1. Ibu Camat Kedungbanteng. Dari beliau penulis memperoleh informasi dan izin penelitian di salah satu desa di Kecamatan Kedungbanteng.
2. Pendamping Desa. Dari beliau penulis disarankan dan mendapat data terkait strategi yang dilakukan salah satu desa yang dinilai mampu mengubah kategori desa sebelum ada dana desa yaitu tergolong desa tertinggal, lalu kemudian setelah adanya dana desa menjadikan desa tersebut menjadi desa berkembang. Desa tersebut yaitu Desa Melung.
3. Bapak Sekertaris Desa Kecamatan Kedungbanteng dan Masyarakat Desa Melung, yang akan menjadi sumber penelitian oleh penulis di Desa Melung.

Pendefinisian secara unik dan struktur, dimana masing – masing objek memiliki variabel yang di kenal dari kelasnya dan dapat memberikan respon dari metode penelitian terhadap kelas tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian penulis yaitu strategi pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa yang di berlakukan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dan penting untuk menentukan suatu penelitian. pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data secara sistematis dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.⁷⁴ Sehingga data yang diperoleh dengan kegiatan observasi tersebut menjadi akurat karena diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian.

⁷⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisni....* hlm. 58

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan melihat strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang digunakan oleh Desa Melung dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Teknik ini mengambil data dengan cara mengamati aktifitas baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat juga masyarakat Desa Melung, terkait strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa upaya menanggulangi kemiskinan.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, ujian dan hipotesis penelitian.⁷⁵ teknik ini ditujukan kepada informan yang terpilih. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *guide interview* yaitu interview yang dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap terperinci seperti yang dimaksud dalam interviewer terstruktur.

Metode digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan melalui dana desa upaya mengatasi kemiskinan. Wawancara akan dilakukan kepada pendamping desa, perangkat desa, dan juga masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kholis selaku pendamping desa, mengenai desa yang akan menjadi objek penelitian. Sekertaris Desa Melung, mengenai apa dan bagaimana strategi yang di terapkan di Desa Melung untuk mengatasi kemiskinan. Bapak Sono selaku ketua unit wisata pagubugan, dan warga Desa Melung.

⁷⁵ *Ibid*...hlm.62

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁷⁶ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data penelitian, dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan yang ada relevansinya dengan objek penelitian. pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian yaitu saat melakukan wawancara terhadap respon berupa wawancara dan foto. Pengumpulan data pada metode dokumentasi ini menggunakan alat berupa : kamera, perekam suara, dan alat tulis.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, data yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya dapat di pahami dengan mudah.⁷⁷

Analisis data adalah proses mencari mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dokumentasi, dan membuat kesimpulan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu cara menganalisa data dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷⁸ Deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel

⁷⁶ Suharsmi Arisusanto, *Manajemen Penelitian*,... hlm. 117

⁷⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabaru,2015), hlm. 33.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,... hlm. 206

yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.⁷⁹ Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai. Pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

Proses analisis data dengan pendekatan penelitian kualitatif sudah dilakukan sejak awal bersamaan dengan pengumpulan data awal dari penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dikomparasikan secara bersamaan antara reduksi data, sajian data dan untuk selanjutnya akan diperoleh suatu simpulan dari hasil penelitian. Tahap-tahap analisis kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengiktisarkan dan memilah-milah berdasarkan suatu konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.⁸⁰

2. Penyajian Data

Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, penyajian data pada analisis kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat

⁷⁹ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.

⁸⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*,.... hlm. 33

naratif. Selanjutnya setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik keabsahan data.⁸¹

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpanan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk teman sejawat, dan pengecekan anggota.⁸²

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸³



IAIN PURWOKERTO

⁸¹ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*.... hlm.247

⁸² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.... hlm. 33

⁸³ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*....hlm.253

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Melung

1. Sejarah Desa Melung

Desa Melung masuk kedalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Ada berbagai versi cerita tentang sejarah Desa Melung. Tentu dari berbagai versi ini hendaknya tidak dijadikan sebagai konflik karena harus memaksakan versinya. Akan tetapi hendaknya saling melengkapi satu sama lainnya. Berikut adalah salah satu versi sejarah Desa Melung.

Sejarah Desa Melung dimulai dengan cerita atau legenda rakyat tentang adanya Syech Abdulrahman Kyai Melung sebagai penguasa dan sesepuh Desa Melung yang tercatat dalam dokumen sejarah terjadinya Desa Melung yang diceritakan sevara turun menurun. Cerita yang turun menurun terus tersebut dilakukan orang tua kepada anak-anaknya atau generasi penerusnya tidak lepas dari sejarah Kadipaten Pasir Luhur, sebagai tempat persinggahan dan perlintasan para prajurit Kadipaten Pasir Luhur.

Pada suatu saat para prajurit dalam perlintasannya mendengar adanya ayam berkokok di kejauhan yang sangat keras bunyinya (melung-melung) disuatu wilayah maka sumber suara berkokok itu ditandai sebagai Desa Melung yang dahulu masuk kedalam Kecamatan Kebumen dan baru sekitar tahun 1995-an lalu kemudian dimasukkan kedalam Kecamatan Kedungbanteng.

Pada jaman penjajahan Belanda, Desa Melung merupakan kebun kopi yang sangat luas dan terkenal di Negara Belanda dengan kopi kampungnya, seiring wilayah tersebut yang memiliki potensi sumber daya air yang sangat melimpah, maka pada tahun 1928 didirikan PLTA Ketenger yang sesungguhnya berada di Melung. Pada jaman penjajahan Jepang yang tercatat sejak tahun 1905 sampai tahun 1940 Kepala Desa yang sejak jaman dahulu disebut lurah, dipimpin oleh Suradirana.

2. Kondisi Geografis Desa Melung



Gambar 4.1
Peta Wilayah Administratif Desa Melung Hutan Negara

Desa Ketenger Desa Windujaya Kec. Baturaden

Desa Karangtengah Desa Kalikesur Desa Kotaliman

LEGENDA

: kali/sungai	-----	: Batas Kecamatan
: jalan	: Batas Desa
: Pemukiman		: Sekolah
: Hutan rakyat		: Kantor Desa
: Persawahan		: Masjid

Secara administrative Desa Melung termasuk dalam Wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, yang merupakan salah satu desa pinggir hutan.

Data secara umum kondisi Desa Melung adalah :

1) Geografi :

Desa Melung yang letak geografisnya berada di Sabuk Sebelah Barat Gunung Slamet merupakan desa pinggir hutan dengan topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah rata-rata 20% – 30%, dan

berada pada ketinggian 600 meter /dpl, beriklim sejuk rata-rata suhu 21°C – 30°C serta curuh hujan yang cukup tinggi rata-rata 3000 – 3500 mm per tahun.

2) Batas Wilayah Desa :

Desa Melung yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Kabupaten Banyumas memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kutaliman dan Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan negara yang dikelola oleh Perum PERHUTANI. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketenger dan Desa Karang Tengah Kecamatan Baturraden.

3) Luas Wilayah Desa :

Wilayah Desa Melung luas wilayah sebesar 1.318 Ha terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) Pemukiman | : 58,609 Ha |
| 2) Sawah $\frac{1}{2}$ irigasi teknis | : 51,000 Ha |
| 3) Sawah tadah hujan | : 10,250 Ha |
| 4) Perkebunan rakyat | : 129,816 Ha |
| 5) Perkantoran | : 0,175 Ha |
| 6) Sekolah | : 0,125 Ha |
| 7) Jalan | : 3,300 Ha |
| 8) Kolam | : 1,060 Ha |
| 9) Lapangan | : 0,280 Ha |
| 10) PLTA Ketenger | : 21,074 Ha |
| 11) Hutan Negara | : 1.042,311 Ha |

4) Jarak wilayah dengan pusat pemerintahan :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1) Jarak ke Ibukota Kecamatan | : 10 Km |
| 2) Jarak ke Ibukota Kabupaten | : 20 Km |
| 3) Jarak ke Ibukota Propinsi | : 295 KM |

5) Jumlah Wilayah Bawahan :

Jumlah wilayah bawahan ada 4 (empat) gerumbul yang terdiri dari :

- a) Kepala Dusun I dengan wilayah :
- b) Gerumbul Depok atau RW 01 terdiri dari 4 (empat) RT
- c) Gerumbul Kaliputra atau RW 02 terdiri dari 5 (lima) RT
- d) Kepala Dusun II dengan wilayah :
- e) Gerumbul Melung atau RW 03 terdiri dari 5 (lima) RT
- f) Gerumbul Selarendeng atau RW 04 terdiri dari 3 (tiga) RT

3. Gambaran Umum Demografis

Desa Melung pada awal tahun 2018 memiliki 569 Kepala Keluarga (KK) Rumah dan 670 KK Nikah dengan jumlah penduduk 2.333 jiwa yang terdiri dari 1.213 Laki-Laki dan 1.120 Perempuan. Dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 3 sampai 4 anggota keluarga.

Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Perkembangan Penduduk :

Jumlah Penduduk Awal Tahun 2018 : 2.333 Jiwa

Laki-Laki : 1.213 Jiwa

Perempuan : 1.120 Jiwa

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia :

Tabel 4.1
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur/ Usia Tahun 2018

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 s/d 1	58	39	97
2	2 s/d 4	59	62	121
3	5 s/d 9	102	95	197
4	10 s/d 14	118	104	222
5	15 s/d 19	98	83	181
6	20 s/d 24	96	87	183
7	25 s/d 29	105	75	180
8	30 s/d 34	106	101	207
9	35 s/d 39	82	99	181
10	40 s/d 44	96	73	169
11	45 s/d 49	67	74	141

12	50 s/d 54	57	62	119
13	55 s/d 59	55	62	117
14	60 s/d 64	40	43	83
15	65 s/d 69	34	30	64
16	70 s/d 74	29	23	52
17	> 75	25	22	47
JUMLAH		1.227	1.134	2.361

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dari jumlah penduduk 2.361 jiwa yang tamat SLTP 377 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tidak/Belum Sekolah : 283 Orang.
- 2) Belum Tamat SD : 176 Orang.
- 3) Tidak Tamat SD : 299 Orang.
- 4) Tamat SD : 990 Orang.
- 5) Tamat SLTP : 377 Orang.
- 6) Tamat SLTA : 188 Orang.
- 7) Diploma I dan II : 6 Orang.
- 8) Diploma IV/ Strata I : 16 Orang.

4. Sarana dan Prasarana

a. Bidang Pertanian

Saluran dan bendungan yang ada diantaranya adalah irigasi :

1. Bendungan dan irigasi Watu Gayong
2. Bendungan dan irigasi Curug gupit
3. Bendungan dan irigasi Kalimanggis/Lubang
4. Bendungan dan Irigasi Wangan Aren
5. Bendungan dan irigasi Wangan Wali
6. Bendungan dan irigasi Kali Tuma
7. Bendungan dan irigasi Wangan Kracak
8. Bendungan Irigasi Rau
9. Bendungan Irigasi Kaliputra
10. Irigasi Blok Mbawang
11. Irigasi Talun

b. Bidang Perhubungan

Di Desa Melung terdapat sarana prasarana perhubungan jalan raya Kabupaten yaitu Ruas Jalan Melung – Kotaliman dan Ruas Jalan Melung – Windujaya serta Jalan – Jalan lain yaitu :

Tabel.4.2
Ruas Jalan Melung – Kotaliman dan Ruas Jalan Melung – Windujaya

No	Nama Jalan	Konstruksi	Kondisi	Keterangan
1.	Melung-Windujaya	Aspalt	Baik	Jalan Kabupaten
2.	Melung-Kotaliman	Aspalt	Rusak	Jalan Kabupaten
3.	Melung-Kalikesur	Aspalt	Rusak	Jalan Desa
4.	Bima RW 03	Paving	Baik	Jalan desa
5.	Melati	Aspalt	Rusak	Jalan desa
6.	Menir	Rabat beton	Baik	Jalan desa
7.	Petruk	makadam	Rusak	Jalan desa

c. Bidang Sosial dan Agama

Pada Tahun 2018 guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah dilaksanakan kegiatan Pengobatan Gratis kerjasama dengan Alumni SMA N 1 Purwokerto Angkatan 2015.

Adapun Jumlah sarana prasarana sosial dan peribadatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Masjid : 4
- 2) Jumlah mushola : 8
- 3) Jumlah TPQ/TPA : 5
- 4) Jumlah Pemakaman : 2

d. Bidang Pendidikan

Jumlah sarana prasarana pendidikan sebagai berikut :

1. Jumlah SD : 1
2. Jumlah SLTP : 1
3. Pendidikan Luar Sekolah : 1
4. Taman Kanak – Kanak : 1
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 1

e. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Maju mundurnya suatu bangsa salah satunya di tangan para Pemuda karena Pemuda adalah Penerus Bangsa, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah desa Melung mengadakan pembinaan terhadap organisasi – organisasi pemuda serta mengadakan peningkatan kemampuan kepada para pemuda dengan mengikutsertakan kepelatihan-pelatihan serta peningkatan dalam bidang olah raga guna memanfaatkan sarana prasarana olah raga yang ada seperti : Lapangan sepak Bola, Lapangan Bola Voly dan Lapangan Bulu Tangkis.

f. Bidang Pemerintahan

Pelayanan masyarakat yang baik di pengaruhi juga oleh beberapa unsur di antaranya Infrastruktur yang memadai serta Aparatur pemerintah yang cukup, untuk mencukupi hal tersebut telah dilaksanakan Pembangunan Balai Desa atau Gedung Serbaguna “ Widya Mandala”, Kegiatan Pengisian Profil Data Dasar Keluarga sebagai basis data yang akan di gunakan antara lain untuk pelayanan masyarakat dalam hal surat-menyurat dengan sistem informasi desa (SID) sehingga diharapkan akan terwujud Pelayanan yang Prima, dengan mengirimkan Perangkat Desa untuk mengikuti berbagai macam pelatihan selain juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

5. Kelembagaan dan Organisasi

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa melung terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Pemerintah Desa Melung yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan menggunakan pola maksimal yang terdiri dari Kepala desa , Sekretaris desa, 2 Kepala Dusun, 3 Kasi, 3 Kaur dan 1 staf (kayim) berjumlah 11 orang.

Sedangkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 orang. Adapun jumlah Aparatur Pemerintah Desa Melung Akhir Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel.4.3
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Melung Akhir Tahun 2015=

No	Nama	Tempat,Tgl lahir	Jabatan	Alamat
1.	Khoerudin,S.Sos	Clp, 15-08 – 1972	Kepala Desa	02/02
2.	Timbul Yulianto	Bms, 12-07-1976	Sekretaris Desa	03/03
3.	Aris Ardiyanto	Bms, 30-01- 1982	Kadus I	03/04
4.	Laeli Hidayati	Bms, 23-01-1991	Kadus II	05/03
4.	Narwin	Bms, 16-05-1976	Kasi Kesejahteraan	05/03
5.	Widi Kurnianto	Bms, 31-8-1973	Kasi Pelayanan	01/01
6.	Sulastri	Bms, 30-08-1972	Kasi Pemerintahan	05/02
7.	Natim	Bms, 17-04-1982	Kaur Perencanaan	03/02
8.	Suryati	Bms, 25-11-1982	Kaur Umum	01/04
9.	Dulrohmat	Bms, 07-04-1965	Staff TU	03/02
10.	Suritno Bambang Margino	Bms, 17-01-1974	Kaur Keuangan	04/03

Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melung
Akhir Tahun 2015 adalah :

Tabel. 4.4
Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Melung Akhir Tahun 2015

No	Nama	Tempat,Tgl lahir	Jabatan	Alamat
1.	Sardi	Bms, 15-10-1970	Ketua	05/02
2.	Slamet	Bms, 09-12-1972	Wakil Ketua	03/01
3.	Sutarti	Bms, 12-04-1974	Sekretaris	03/03
4.	Ngusman	Bms, 28-08-1984	Kabid Pemerintahan	02/04
5.	Sudiro	Bms, 19-10-1974	Kabid Pembangunan	01/03
6.	Ritam Sulistiyono	Bms, 16-04-1973	Kabid Kesra	03/02
7.	Budi Ratmiko	Bms, 20-10-1978	Anggota	04/01

b. Lembaga Desa

Lembaga di Desa Melung adalah :

1) Lembaga Pembangunan Kemandirian Desa (LPKD)

Merupakan lembaga desa yang berkonsentrasi pada pembangunan fisik dan sebagai lembaga perencana pembangunan desa.

2) Rukun Tetangga (RT)

Adalah lembaga desa yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan.

3) Rukun Warga (RW)

Merupakan lembaga desa yang bertugas mengkoordinir RT-RT diwilayahnya

4) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Merupakan lembaga desa yang bertugas memberdayakan kaum perempuan dan menangani kesehatan ibu dan anak serta tim Keluarga Berencana tingkat desa.

5) Karang Taruna

Lembaga desa yang berkonsentrasi dalam kegiatan kepemudaan baik dibidang olahraga, kesenian dan kegiatan lainnya tentang kepemudaan.

6) Pager Gunung

Merupakan lembaga desa yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kehutanan dan perkebunan. Yang terdiri dari kelompok-kelompok tani :

7) Kelompok Tani Sida Mulya untuk wilayah gerumbul Depok dan Kaliputra yang lebih fokus pada kegiatan pertanian sawah, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta hortikultura.

8) Kelompok Tani Sida Makmur untuk wilayah Gerumbul Melung dan Selarendeng yang lebih fokus pada kegiatan pertanian sawah, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta hor-tikultura

9) Kelompok Wanita Tani Sida Mukti

10) Kelompok Tani Ternak Cendana Sari

c. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Lembaga desa yang berfungsi sebagai tim keamanan dan ketertiban serta tim penanggulangan bencana.

d. Tirta Cendana Sari

Merupakan lembaga yang mengurus dan menangani pengelolaan air bersih.

e. Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A)

Lembaga desa yang mengurus dan menangani Pengguna air untuk Pertanian dan Perikanan.

f. Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A)

Suatu lembaga desa yang mengurus dan menangani Kegiatan dan Pendidikan Agama Islam.

g. BUMDesa merupakan lembaga/badan usaha milik desa yang bergerak di bidang ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Penghasilan Asli Desa sebagai representasi atas usaha desa.

h. Organisasi Sosial Keagamaan

- 1) Nahdlatul Ulama (NU)
- 2) Fayat NU
- 3) Muslimat NU
- 4) IPNU-IPPNU
- 5) Pengurus TPQ “Kyai Melung”

i. Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Paguyuban Seni Ebeg atau Kuda Lumping/Kuda Kepang.
- 2) Paguyuban Seni Calung.
- 3) Paguyuban Seni Hadroh.
- 4) Paguyuban seni karawitan atau gamelan.

6. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Desa Melung masih mencanangkan menjadi Desa Pertanian Organik dengan harapan kedepan menjadikan desa Agrowisata dan Ekowisata. Hal tersebut dikarenakan letak sangat strategis berdekatan dengan lokawisata Baturraden, dan memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan nilai ekonomis disamping adanya PLTA Ketenger yang berada di Desa Melung dapat dijadikan wisata teknik dan pendidikan, selain juga mulai tahun 2016 juga sedang merintis pembangunan Desa Wisata yang diantaranya

adalah membuka Wisata Pagubugan yang memanfaatkan lahan pesawahan tanah Ex Bengkulu Desa.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana umumnya desa-desa pinggir hutan, untuk kondisi ekonomi masyarakat sangat rendah hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah pula, sehingga minim pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki. Banyak kalangan generasi muda yang keluar desa untuk mengadu nasib di kota-kota besar dengan ketrampilan dan pendidikan yang rendah, sehingga mereka pada umumnya bekerja di sektor buruh pabrik. Pendapatan rata-rata penduduk berkisar Rp. 1.200.000,- karena pada umumnya masyarakat desa Melung adalah buruh tani dengan penghasilan yang tidak tetap.⁸⁴

7. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi khususnya di desa.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang dana desa, tentunya tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan melalui dana desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan segala aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakatnya secara umum. Selain itu, segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi

⁸⁴ Profil Desa Melung

masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Melung selama ini belum berjalan secara maksimal, terutama sebelum adanya bantuan dana yang cukup besar dari pemerintah. Terutama pembangunan infrastruktur yang sering terabaikan karena terbatasnya dana yang tersedia. Berdasarkan wawancara dengan bapak sekretaris Desa Melung, pemberdayaan masyarakat Desa Melung sebelum adanya dana desa memang kurang, sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan keadaan infrastruktur desa masih sangat kurang, seperti jalan, talud, dan lainnya.⁸⁵

Membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Desa Melung dalam melaksanakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dana desa, maka hal itu tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melung dalam melaksanakan program, terkhusus dalam memberdayakan masyarakat melalui dana desa.

Menurut Sekretaris Desa Melung yaitu Bapak Timbul Yulianto menyatakan bahwa tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat melalui dana desa adalah melalui program-program kerja desa, yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah kedusunan (MUSDUS) di setiap kedusunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan oleh pemerintah desa nantinya. Setelah aspirasi dari masyarakat tertampung pada MUSDUS, kemudian dilanjutkan dengan diadakan musyawarah desa (MUSDES). MUSDES, dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuka agama, lembaga, yang tujuannya untuk menampung dan memilah aspirasi masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan dalam satu periode pemerintahan kedepan. Kegiatan ini dimulai pada saat Kepala Desa terpilih dan dilantik. Dalam waktu 3 bulan,

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Timbul Yulianto (Sekertaris Desa Melung), di Balai Desa Melung, 12 Juni 2019

kepala desa terpilih harus menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), lalu kemudian disusul penyusunan RKDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada bulan Juni hingga September dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dimulai pada bulan oktober sampai dengan desember. Dalam penyusunannya, Kepala Desa Melung mempunyai Visi yaitu, “*Desa Melung yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera*”. Sedangkan Misinya mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan persoalan yang ada, dan misi pembangunan harus dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, tentunya harus seimbang dengan aspirasi masyarakat dan juga program dari pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan suatu strategi agar bisa mengkombinasikan keseluruhnya. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa Melung adalah, melakukan proses dengan sistematis, dan lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Keinginannya yaitu terwujudnya visi Desa Melung itu sendiri yaitu menjadikan desa yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Jadi, yang lebih diutamakan dan diinginkan Pemerintah Desa Melung adalah agar masyarakat dan desanya itu sejahtera dan mandiri juga berkualitas. Dengan diadakannya pelatihan yang berdampak masyarakat produktif, juga menghidupkan BUMDES, dengan dibentuknya sarana wisata.

Kedua, Setelah melakukan musyawarah, maka pemerintah desa akan mengambil skala prioritas, dari program-program yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas program akan dilaporkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes dan RKPDes. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan dengan pola swakelola. Dimana berarti memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam upaya swakelola berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, tidak akan mengalir keluar

desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di desa itu sendiri. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja tentunya mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, atau masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai anggota penyandang disabilitas atau kelainan mental. Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan memang betul terjadi, yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk strategi pembangunan yang diharapkan mampu memperbaiki perekonomian di desa. Arah Dana Desa adalah sebagai sarana atau jembatan agar suatu desa dapat mandiri, dengan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakatnya. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Desa Melung adalah dengan memanfaatkan ex bengkok sawah sebagai sarana wisata. Dengan di bentuknya wisata, diharapkan bisa menyumbang untuk pendapatan desa yang berujung pada pengentasan kemiskinan, dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk para masyarakatnya. Berikut adalah bentuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melung melalui program dana desa memberdayaan masyarakat :

a. Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Wisata Desa

Program Dana Desa merupakan program yang dicetuskan oleh pemerintah dalam upaya untuk pemerataan pendapatan masyarakat, yang di bagi menjadi dua bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan sub program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat itu bisa berpenghasilan. Berarti, harus menyediakan lapangan pekerjaan. Disini, Pemerintah Desa Melung, memanfaatkan potensi

sumber daya alam yang ada. Dengan menggunakan ex sawah bengkok, untuk sarana wisata yang diwadahi oleh BUMDES yang kemudian dinamai Wisata Pagubugan yang didirikan sejak tahun 2017, semula hanya memperbaiki sarana irigasi, dan sarana selfi untuk para wisatawan. Udara yang sejuk dan pemandangan hijau sawah juga air yang mengalir masih jernih alami sangat menarik wisatawan untuk berkunjung. Semakin berjalanya waktu, wisata pagubugan semakin diminati banyak orang dan kemudian selalu di adakan perbaikan dan pengembangan. Kemudian di tahun 2019, pemerintah desa melepaskan satu petak tanah padi garapan, untuk dibuat kolam renang. Ini merupakan strategi yang dilakukan pemerintah Desa Melung untuk menarik wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sekertaris Desa Melung, beliau mengatakan :

*“Dengan merelakan satu petak garapan sawah, dan satu tukang penggarap, mampu menyerap beberapa penggarap. Ibaratnya mati satu tumbuh seribu”.*⁸⁶

Setidaknya, pemerintah desa mampu memberdayakan masyarakatnya sebagai penggarap dan pengelola pagubugan . Pemerintah Desa Melung telah mensiasati pengelolaan wisata hanya dengan mengolah atau memanfaatkan tanah bengkok, yang kemudian diolah oleh BUMDES. Terdapat dua unit yang turun langsung ke sektor wisata ini, yaitu unit wisata dan unit UP2K. Dimana unit wisata bergerak dibidang pengelola wisata, antara lain ; penjaga loket, penjaga parkir, penggarap, dan bidang kebersihan. Sementara dibidang UP2K, adalah para ibu-ibu yang bergiliran berdagang dan menjaga warung. Terdapat beberapa warung yang berdagang di wisata tersebut, tetapi, warung yang berdiri dibawah UP2K sebanyak 2 warung saja. Selain itu, sebanyak 4 warung yang didirikan warga Desa Melung untuk ikut serta mencari rizki dengan berdagang. Setidaknya, ada 20 orang yang telah diberdayakan pemerintah Desa Melung dengan adanya wisata pagubugan ini, juga masyarakat yang

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Timbul Yulianto (Sekertaris Desa Melung), di Balai Desa Melung, 13 Juni 2019

ikut memanfaatkan peluang dengan menjadi pedagang diwisata pagubugan ini. Berdasarkan wawancara dengan ketua pengelola pagubugan, Pak Sono, beliau mengatakan :

“Dengan adanya wisata pagubugan, diharapkan mampu menyumbang PAD agar Desa Melung bisa menjadi desa mandiri. Jika PAD kita sudah mencapai angka yang besar, otomatis desa mampu memutar uangnya didalam desa itu sendiri. Artinya desa bisa mandiri. Selain itu juga akan diadakan lagi atau dibuka wisata-wisata baru, dengan pemanfaatan alam, nanti kita juga akan membuka wisata sebagai sarana untuk camping.”⁸⁷

Dalam pembangunan dan pengelolaan wisata pagubugan memerlukan dana yang cukup besar, kucuran dana tersebut bersumber dari dana desa sebesar Rp 151.700.000,00. Dengan adanya kucuran dana yang cukup besar dari dana desa, Desa Melung mampu membangun wisata pagubugan.

b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier atau Sederhana

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi sering diartikan sebagai pengairan yang dilakukan bagi area persawahan. Istilah irigasi sangat sering ditemukan di daerah yang mempunyai banyak sawah, karena proses utama menciptakan kesuburan tanah atau sebaliknya adalah dengan adanya air. Selain untuk persawahan, air juga menjadi kebutuhan pokok manusia. Sebagai air minum dan sarana mensucikan diri dan lainnya.

Kondisi di Desa Melung adalah desa dimana keadaan geografis berada di wilayah pegunungan, dengan banyak persawahan yang berarti juga penduduknya sebagian besar adalah buruh tani atau penggarap sawah. Dengan demikian, irigasi merupakan hal yang penting. Selain untuk kebutuhan hidup dan pengairan sawah. Selain itu juga, sebagai pengairan dan mengairi kolam renang yang ada di tengah sawah yang menjadi salah satu icon wisata di Desa Melung, yaitu wisata pagubugan. Dengan adanya wisata tersebut, tentunya irigasi harus di pelihara dengan

⁸⁷ Wawancara dengan Pak Sono (Ketua Pengelola Pagubugan), di Pagubugan Melung, 19 Juni 2019

baik dan memerlukan kurang lebih 40 tenaga kerja dalam program irigasi tersebut, yang tentunya tenaga kerja yang mengelola irigasi adalah dari masyarakat Desa Melung itu sendiri, atau penduduk lokal.

Dalam pelaksanaan program irigasi ini, pemerintah Desa Melung telah mengalokasikan dana sebesar Rp 221.276.500,00 dan dana yang digunakan bersumber dari dana desa. Dana desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Melung dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi.

c. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala nasional. Pembangunan infrastruktur pastinya akan berpengaruh terhadap beberapa sektor. Yang paling utama adalah bagaimana pembangunan tersebut mampu mempermudah aktifitas masyarakat.

Peran dana desa memang sangat penting bagi pembangunan. Sebelum adanya dana desa memang sudah ada bantuan dari pemerintah, tetapi belum cukup mampu untuk pengolahan pembangunan. Karena dana yang terbatas, membuat pembangunan tidak maksimal. Adapun tanggapan dari masyarakat yaitu Bapak Hartono, selaku warga Desa Melung :

*“Semenjak adanya dana desa memang lebih terlihat pembangunannya. Dimana-mana pembangunan, jalan, irigasi dan lainnya”.*⁸⁸

Kondisi pembangunan di Desa Melung saat ini sudah di katakana berkembang. Pemerintah Desa Melung sedang berupaya melakukan pembangunan-pembangunan, salah satunya adalah pembangunan jalan desa dan jembatan. Ini adalah salah satu strategi Pemerintah Desa Melung, selain untuk mempermudah aktifitas masyarakat Desa Melung itu sendiri, juga sebagai sarana untuk menjadi daya tarik untuk

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Hartono (Warga Desa Melung), di Melung, tgl 13 Juni 2019

mempermudah wisatawan untuk berkunjung. Tidak dipungkiri, faktor kemudahan perjalanan sebagai arus lalu lintas kegiatan manusia memang paling penting. Dimana jika infrastruktur itu dalam keadaan baik, jalan baik, jembatan penghubung dan lainnya dalam keadaan baik, maka akan mempermudah jalanya kegiatan atau aktifitas sehari-hari. Selain itu juga sangat penting menyediakan jalan yang bisa ditempuh oleh kendaraan. Selain untuk aktifitas sehari-hari, juga untuk menyediakan kenyamanan berkendara untuk pada wisatawan yang berkunjung.

Dalam pelaksanaannya, melalui dana desa, Pemerintah Melung telah menghabiskan dana sebesar 117.888.000 pembangunan secara bertahap dan menyeluruh kepada setiap dusun yang ada di Desa Melung sudah nampak membuahkan hasil. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Melung tentunya berdasarkan usulan dari masyarakat, hal ini agar supaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Melung benar-benar terasa manfaatnya.

d. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Kaum perempuan memang sudah disetarakan derajatnya dengan kaum laki-laki. Maka, kaum perempuan yang menghabiskan waktunya dirumah untuk mengurus rumah tangga, juga berhak diberikan ilmu pengetahuan dan pelatihan. Dengan adanya program dari pemerintah yang khususnya memberdayakan kaum perempuan, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi di masyarakat, yaitu dengan pengadaan pelatihan seperti pelatihan administrasi desanwisma, pelatihan posyandu, pelatihan pengelolaan limbah, pelatihan pembuatan kue basah dan pelayihan pembuatan piring berbahan baku lidi. Ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana berawal dari pelatihan, nantiya akan memberinya bekal untuk berwirausaha sendiri. Pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 10. 501.000,00 yang bersumber dari dana desa.

Salah satu pelatihan yang kemudian menciptakan penghasilan, dalam artian mampu mengembangkan kemudian menjual produk adalah pembuatan piring berbahan baku lidi. Meskipun belum menjual dalam jumlah banyak dan belum sampai keluar kota, namun apabila dikembangkan terus akan menambah sektor perekonomian masyarakat di Desa Melung khususnya. Karena, akan menciptakan lapangan kerja baru dan juga memperoleh pendapatan. Dengan ini, kaum wanita juga mampu berperan memperoleh penghasilan.

B. Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan di Desa Melung

Pemberdayaan menurut Djohani adalah memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.⁸⁹ Berdasarkan teori tersebut, pemberdayaan sejatinya adalah memberdayakan, memberi kesempatan bagi yang lemah, memberikan pekerjaan, kesempatan, dan pelatihan. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana pemerintah mampu memberdayakan masyarakatnya sendiri, sehingga mereka mempunyai nilai, dan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kepentingan lain.

Irma tidak merekomendasikan untuk melakukan pengalihan langsung barang dan jasa yang diperlukan oleh kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alasan ; *pertama*, pendekatan pengalihan langsung kurang efektif karena cenderung habis. *Kedua*, hal itu di luar kemampuan pemerintah negara berkembang. *Ketiga*, hal itu perlu dipertahankan terus selama-lamanya. *Keempat*, hal itu tidak memungkinkan kaum miskin untuk memutuskan pola konsumsinya sesuai dengan prioritas mereka sendiri, budaya mereka, keadaan mereka.⁹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sudah di jelaskan di bab sebelumnya, bahwa Dana

⁸⁹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*...hlm. 49

⁹⁰ Junaidin Zakaria, *"Pengantar Teori Ekonomi Makro"*,...hlm.96

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.⁹¹

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah dan untuk melaksanakan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa, yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Melalui dana desa, pemberdayaan masyarakat dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan strategi yang mampu mawadahi komponen masyarakat. Dengan dikeluarkannya kebijakan tentang dana desa, berarti pemerintah berupaya agar suatu tatanan dapat tercapai pada titik dimana desa bisa membangun dirinya agar berkembang pesat.

Menurut Chamber, individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan dibutuhkan orang luar. Orang tersebut yang bertugas memberdayakan ini adalah pemerintah, maupun pegawai kelurahan atau desa.⁹²

Melalui dana desa, kemudian pemerintah mempunyai peran penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa. Dinama sasaran utama untuk program pemberdayaan adalah orang yang lemah, dalam artian mungkin saja mampu

⁹¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*,hlm. 51

⁹² *Ibid.*.....hlm. 55

tetapi tidak adanya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Entah karena faktor usia, Pendidikan, sosial, ataupun letak. Ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, dimana harus merangkul semua kalangan, terutama kalangan yang lemah. Perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam mewujudkan program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan dengan pola swakelola. Dimana berarti memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam upaya swakelola berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di desa itu sendiri. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja tentunya mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, atau masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai anggota penyandang disabilitas atau kelainan mental. Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan memang betul terjadi, yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam adalah karena adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam islam, konsep pemberdayaan masyarakat di jelaskan dalam Al-Quran QS. Ar-Ra'd ayat 11 :

ان الله لا يغير ما بقو حتى يغيروا وما بأ نفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas*

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan , selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Hal ini tentu sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dimana melalui pemberdayaan masyarakat maka masyarakat dapat di beri peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dengan diberi pelatihan ataupun dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan mereka dapat mengelola dan mengolah sumber daya tersebut, dapat mengubah keadaannya ataupun menaikkan derajatnya dari miskin menjadi mempunyai kemampuan

Dengan program swakelola, ini sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Melalui berbagai upaya seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui pembangunan maupun unit wisata, dan pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan dengan melakukan pembekalan dan pelatihan. Adapun dalam aspirasi masyarakat bisa di musyawarah dan mufakatkan dalam tahap perumusan program desa.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dalam memberdayakan tentunya lebih mengutamakan bagi orang yang lemah disini berarti orang yang lebih membutuhkan. Melalui sistem swakelola, pemerintah

desa menyaring masyarakat yang akan diberdayakan seperti masyarakat yang masih menganggur, dan warga penyandang disabilitas.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dan potensinya. Dengan masyarakat diberikan pelatihan maupun karena adanya bantuan dana desa, tentunya lebih bisa di rasakan manfaatnya terhadap semua lapisan masyarakat.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁹³

Jika melihat dari potensi atau sumber daya alam yang dimiliki Desa Melung yang notabennya adalah pegunungan, maka peluang yang bisa diambil adalah potensi alam. Sebagian masyarakat adalah buruh tani. Maka, Pemerintah Desa Melung telah melihat pemungkinan yang sekiranya bisa dilakukan oleh masyarakatnya. Disini bisa dilihat bahwa dengan memanfaatkan ex bengkok sawah, bisa mengangkat wisata yang diminati wisatawan. Tanpa mengurangi esensi dari sawah itu sendiri. Masyarakat disilahkan untuk mengkreasikan sawah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai, selain sebagai penghasil padi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam menanggulangi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dengan adanya dana desa memang besar pengaruhnya terhadap kemiskinan yang ada di desa itu sendiri. Desa yang tadinya tidak mempunyai modal untuk membenagun infrastruktur, dengan adanya dana desa akan sangat terbantu. Arah dana desa adalah pembentukan desa yang mandiri. Tentunya

⁹³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*,...hlm.87 dan 88

dengan pola swakelola, pemerintah desa telah menyaring masyarakatnya, yang benar-benar akan diberdayakan. Yaitu masyarakat yang pengangguran, salah satu masyarakat peyandang disabilitas dan kaum perempuan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan, sudah pasti akan membuat masyarakatnya yang tadinya tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan.

Selain itu, dengan adanya wisata, bisa menyokong atau bisa sebagai salah satu instrumen pendapatan desa yang utuh. Dimana ini sudah sesuai dengan kebijakan keuangan daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain wisata juga ada pemberdayaan perempuan yaitu pembuatan piring dari lidi. Bahan baku lidi tentunya dari Desa Melung itu sendiri tidaklah sulit. Karena letak geografis Desa Melung yang berada di wilayah perbukitan, sangat mudah untuk mendapatkan bahan baku lidi ini.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang mempunyai tugas utama mengembangkan diskursus serta untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga legislatif dan eksekutif serta masyarakat lainnya untuk menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.⁹⁴ Adapun kebijakan pengentasan kemiskinan, antara lain :

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Di Indonesia atau mungkin dimana saja, pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktifitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal

⁹⁴ Abdul Bashith, “*Ekonomi Kemasyarakatan*”, (Malang; UIN Maliki Press, 2012), hlm.74-76

keampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan memberi pelatihan pada wanita tentang anyaman lidi yang menghasilkan kerajinan piring dari lidi, maka akan berdampak pada sektor produktivitas. Karena ini akan terus berkembang. Selain itu juga, bakat dari masyarakat Desa Melung yaitu buruh tani, maka di sediakan lahan pertanian yang kemudian menjadi wadah kekreatifan masyarakatnya untuk menarik wisatawan. Hanya dengan bengkok sawah ternyata bisa menjadikan Desa Melung menjadi terekspos sampai viral.

2) Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi.

3) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Keterlibatan aktif dari LSM di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LSM juga dapat meningkatkan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.⁹⁵

Di Desa Melung peran BUMDES saat ini memang berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah. Arah dari dana desa memang untuk membuat desa tersebut menjadi desa mandiri. Dari kegiatan dan produk yang dihasilkan melalui BUMDES, akan berpengaruh pada pendapatan desa, yang kemudian bisa diolah kembali didesa itu sendiri. Sehingga

⁹⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 1988), hlm.307-309

Desa Melung pada saatnya bisa mandiri, artinya bisa mengolah masyarakatnya sendiri, tanpa membutuhkan kucuran dana bantuan dari pemerintah, terutama dalam hal pmbnagunan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan penggalian dan peningkatan PAD yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.⁹⁶

Tabel 4.5
Tabel Pendapatan Asli Desa Melung:

No	Tahun	PAD
1	2017	Rp 54.102.304,00
2	2018	Rp 62.858.337,00
3	2019	Rp 119.000.000,00

Sumber : PAD Desa Melung

⁹⁶ Windu Putra. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok: Rajawali Pres, 2018). hlm.150

Sebelum adanya dana desa, sumber pendapatan selain tanah kas desa juga bersumber dari surat menyurat, pengantar, dan lain sebagainya. Setelah adanya dana desa, sumber pendapatan hanya bersumber dari tanah kas desa. Dari kegiatan unit wisata dari BUMDES, ternyata mampu menyokong pendapata asli desa yang cukup besar.

Berdasarkan wawancara dengan ketua pengelola pagubugan, Pak Sono, beliau mengatakan :

“Dengan adanya wisata pagubugan, diharapkan mampu menyumbang PAD agar Desa Melung bisa menjadi desa mandiri. Jika PAD kita sudah mencapai angka yang besar, otomatis desa mampu memutar uangnya didalam desa itu sendiri. Artinya desa bisa mandiri. Selain itu juga akan diadakan lagi atau dibuka wisata-wisata baru, dengan pemanfaatan alam, nanti kita juga akan membuka wisata sebagai sarana untuk camping.”⁹⁷

Irma Adelman, mengemukakan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi penduduk miskin adalah pendekatan yang berorientasi pada produktifitas yang bertujuan meningkatkan pendapatan kaum miskin. Dengan meningkatkan produktifitas mereka dan sekaligus meningkatkan kemampuan memperbesar produktifitas mereka. Upaya meningkatkan produktifitas dapat dilakukan melalui :

- a) Mengatur mutu tenaga kerja melalui investasi dalam modal kemanusiaan.

Dengan adanya dana desa, desa mampu mengadakan pembangunan dan mampu mengangkat tenaga kerja dengan pola swakelola. Dengan di dasari pelatihan dan keampuan di bidangnya. Melalui BUMDES, Pemerintah desa membuat unit wisata, yaitu pagubugan, dan juga pelatihan yang menghasilkan pendapatan untuk desa. Dengan pola swakelola, yang diberdayakan dan bahan baku juga mengambil dari masyarakatnya sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah (5) : 2 :

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa”*.

⁹⁷ Wawancara dengan Pak Sono (Ketua Pengelola Pagubugan), di Pagubugan Melung, 19 Juni 2019

Dengan dibukanya wisata, maka akan menyerap tenaga kerja, dengan pola swakelola bisa memberi kekuatan bagi masyarakat yang lemah, agar mereka bisa berkesempatan untuk mendapat pekerjaan.

- b) Meningkatkan jumlah milik-milik pelengkap dipunyai kaum miskin (tanah atau modal).

Dengan memanfaatkan ex bengkok sawah, yang dibiayai oleh dana desa, membuat ex bengkok sawah sebagai objek wisata. Dan juga barang tentu bisa mengangkat tenaga kerja dari masyarakatnya. Tidak mengurangi nilai dari sawah penghasil padi, juga bisa menghasilkan di lain bidang, yaitu dari sisi wisatanya. Dengan mengorbankan satu petak sawah, untuk dijadikan kolam renang sebagai penambah daya tarik wisatawan juga malah menambah tenaga kerja yang diberdayakan disini.

- c) Memperkenalkan perubahan teknis yang meningkatkan produktifitas.⁹⁸

Produk dari Dana Desa adalah mengarah pada BUMDES, kemudian dari dalam bumdes itu akan mendapat pendapatan. Dengan strategi pemanfaatan ex bengkok sebagai objek wisata, ternyata bisa menyokong pendapatan asli desa. Dengan bertambahnya pendapatan asli desa, maka di harapkan bisa membuat desa itu menjadi desa mandiri. Dimana desa tersebut sudah tidak memerlukan lagi kucuran dana dari pemerintah, karena sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri.

Terbukti dari sebelum adanya dana desa, Desa Melung terdaftar didalam IDT yang berarti termasuk desa tertinggal, kemudian dengan adanya dana desa, melalui IDM (Indeks Desa Membangun), status Desa Melung mampu berubah dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Menurut wawancara dengan bapak sekretaris desa, bahwa Desa Melung optimis untuk menjadi desa mandiri dalam

⁹⁸ Junaidin Zakaria, “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm.96

waktu dekat ini. Dengan menghidupkan objek wisata lain, dan akan mengembnagkan pelatihan yang ujungnya bisa sampai berproduksi.

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dia membagi kemiskinan menjadi dua bagian, yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material, dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Dalam islam, kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islampun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.⁹⁹

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural. Allah sejatinya telah menjamin rezeki dari setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS. Hud 11:6) Pada saat yang sama, Islam pun telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS. Al-Mulk 67:15). Ditambah lagi setiap makhluk mempunyai rezekinya masing-masing (QS. Al-Ankabut 29:60) dan tidak akan kelaparan (QS. Taha 20:118-119). Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa kemiskinan dalam perspektif islam akarnya adalah kesalahan manusia itu sendiri dalam perilaku ekonominya, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun distribusi.¹⁰⁰

Dalam islam, terdapat dua mazhab dalam menjelaskan tentang siapa yang sebenarnya disebut miskin. Pertama, mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak mempunyai suatu apapun juga. Kedua, mazhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai seperdua dari keperlunaya atau lebih tetapi tidak mencukupi.¹⁰¹

⁹⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm.23

¹⁰⁰ Amir Machmud, *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 222

¹⁰¹ *Ibid...* hlm.226

Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi , sertankemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensi menjadi Desa Maju, yang memilili potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.¹⁰²

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya dana desa, yang kemudian dengan strategi pemberdayaannya, bisa mengangkat atau menanggulangi kemiskinan di masyarakat desanya. Dengan bukti bahwa sekarang posisi status Desa Melung sekarang adalah desa Berkembang, dan aparat pemerintah desa mengaku optimis dalam waktu dekat ini bisa ke taraf desa maju. Artinya, adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Selanjutnya diharapkan akan mampu mewujudkan desa yang mandiri dimana:

¹⁰² www.permendesaPDTTransNo2Tahun2016, diakses pada hari Senin, 26 Agustus 2019, pukul 09.05

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan riset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga setempat.
- 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, pada bab-bab sebelumnya dan berbagai literatur dan penelitian di lapangan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Melung sebelum adanya dana desa memang kurang, sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan keadaan infrastruktur desa masih sangat kurang, seperti jalan, jembatan dan pembangunan desa yang lainnya, karena terbatasnya dana. Setelah adanya kucuran dana desa, pembangunan sudah dirasakan secara merata, seperti pembuatan jalan maupun perbaikan jalan desa, irigasi, talud. Dengan adanya dana desa, selanjutnya diharapkan akan mampu mewujudkan desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan riset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga setempat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Melalui strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Melung, diantaranya adalah pelatihan dan pembuatan wisata, ternyata mampu menyerap tenaga kerja, dan sudah barang pasti memberikan penghasilan atau pendapatan. Dengan pola swakelola, masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat lemah, yaitu pengangguran, masyarakat penyandang disabilitas, dan kaum

perempuan. Selain itu, dari unit wisata, selain memberdayakan juga mampu menyokong PAD dengan jumlah yang cukup besar. Gotong-royong antar warga juga terjalin dengan baik untuk bersama-sama membangun desa.

Sebelum adanya dana desa, Desa Melung termasuk desa tertinggal, kemudian setelah adanya dana desa, status desa melung menjadi desa berkembang, dan dengan strategi dan terus berinovasi, maka pemerintah desa mengaku optimis untuk Desa Melung menjadi desa yang maju. Melalui bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah barang pasti bahwa dana desa memang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Melung, tentang strategi pemberdayaan melalui dana desa di sini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain :

1. Bagi Desa Melung

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama penelitian berlangsung di Desa Melung, maka penulis menyarankan untuk Desa Melung semoga lebih maju lagi, bisa terus berinovasi untuk menambah daya tarik wisatawan khususnya, dengan menambah wahana seperti tanaman untuk mempercantik pemandangan di pagubugan, ataupun taman edukasi, dan difasilitasi hiburan atau tontonan seperti kesenian dan pertunjukan. Oleh karena semakin viralnya Desa Melung atau karena adanya wisata, maka sebaiknya dicantumkan berbagai produk dan keunggulan dari Desa Melung itu sendiri ke dalam website Desa Melung, untuk lebih memasarkan bagaimana keadaan Desa Melung.

2. Bagi Praktisi

Berdasarkan hasil yang digunakan yaitu “Menjadi referensi utama bagi Desa Melung khususnya dan desa lain pada umumnya, untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan produk agar supaya desa memperoleh pendapatan asli desa. Melalui BUMDES, bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang sudah Allah berikan sebagai fasilitas, agar manusia bisa

memanfaatkan sebaik mungkin. Sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakatnya yang ada didesa tersebut. Dengan adanya modal, bisa di buatkan sarana untuk masyarakatnya bisa memperoleh kemanfaatan seperti memperoleh pekerjaan dan penghasilan, kegiatan saling membantu dan memudahkan sesama, semoga bisa memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Amin.

3. Bagi Akademisi

Adapun saran bagi kalangan akademisi diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dalam bidang strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, bisa di kaitkan dengan persoalan yang terjadi sekarang dan akan datang.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- M. Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006)
- Arisusanto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 1988)
- Atmojo, Mohamad Eko dkk. "Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo" *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017
- Badrudin, Rudi. *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)
- Bashith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012)
- Departemen Dalam Negeri, Tugas, Fungsi dan Peranannya dalam Pemerintah Daerah, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 1985)
- Erniati. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2010.
- Hafid, Risma. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pengkep", Skripsi. Makasar: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin Makasar, 2017.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015)
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Maulana, M. Indra. "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipura, Kab. Lampung Selatan)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitaatif edisi refisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Mulia, Rudiana. ”*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Home Industri Desa Cimuncang, Malausma, Majalengka, Jawa Barat)*”, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015
- Mulyani, Sri. *Buku Pintar Dana Desa*, E-Book: mentrian Keuangan, 2017
- Muthoriq dkk. “*Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3.
- Nafiudin, Muhamad. “*Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*”, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Narbuko, Chalid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Prasetyaningtyas, Feny Yudanti. “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*” Skripsi Semarang: Universtas Diponegoro.
- Profil Desa Melung
- Putra, Windu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok: Rajawali Pres, 2018)
- Rahayu, Depi. “*Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*” Junal: Universitas Negeri Semarang, Economics Development Analysis Journal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017
- Soepardjo. *Tugas, Fungsi dan Peranannya Dalam Pemerintah di Daerah*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1985)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*,(Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006)
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabaru,2015)
- Suwondo dkk, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Desa Wonorejo Kecamatan*

Singosari Kabupeten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6 Hal 1203-1212.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009)

Tika, Moh. Pabundu. *Metode Riset Bisnis* (Jakarta; Bumi Aksara, 2006)

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)

Usman, Sunyoto. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”
(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012)

Widjaja, HAW. “*Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli* ”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.idm.kemendesa.go.id

www.kemenkeu.go.id

www.permendesaPDTTransNo2Tahun2016

Yustika, Ahmad Erani dan Rukavina Baksh. “*Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian dan kedaulatan Pangan*”, (Malang: Empat Dua, 2016)

Zakaria, Junaidin. “*Pengantar Teori Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO